**Analisis Konflik *Arab Spring* di Suriah**

***The Analysis of Conflict Arab Spring in Suriah***

Muhammad Ridho1 Yanyan Muhamad Yani2 Arfin Sudirman3\*

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pola fenomena Arab spring yang terjadi di Suriah. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, karena tehnik pengumpulan data yang digunakan menjadikan buku dan dokumen terkait Arab spring di Suriah sebagai kerangka acuan, serta beberapa data dari website yang valid. Tehnik analisis data melalui tiga komponen yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dimana di dalamnya disertai pula verifikasi data dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa fenomena Arab spring yang terjadi di Suriah mengkerucut kepada konflik antar etnis yang terjadi antara sunni-alawie, kemudian dipicu dengan adanya fenomena Arab spring yang merebak di kawasan timur tengah.

**Kata Kunci: Konflik, Arab Spring, Suriah**

***Abstract***

This article discusses the pattern of the phenomenon of Arab spring that occurred in Syria. The type of this study uses a qualitative approach with the literature study method, because the data collection techniques used make books and documents related to the Arab spring in Syria as a reference frame, as well as some data from a valid website. Data analysis techniques through three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions in which data verification is also accompanied by triangulation of data sources. The results showed that the phenomenon of Arab spring that occurred in Syria converged on inter-ethnic conflict that occurred between the Sunni-Alawie, then triggered by the phenomenon of Arab spring that spread in the Middle East.

***Keywords:*** *Conflict, Arab Spring, Suriah*

**How to Cite:** Ridho, M, Yani, M.Y, Sudirman, A (2019):Analisis Konflik Arab Spring di Suriah**,** *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial.*

**Pendahuluan**

Fenomena Arab *spring* atau musim semi Arab adalah istilah politik yang sangat ramai diperbincangkan dalam poitik internasional, khususnya di kawasan Arab, sejak awal tahun 2011. Istilah yang bermakna jatuhnya rezim-rezim pemimpin otoriter di tanah Arab, dimulai dari jatuhnya Zein Al-Abidin bin Ali (Ben Ali) di Tunisia, kemudian Hosni Mubarak di Mesir, lalu runtuhnya era kediktatoran Moammar Khadafi yang sudah berlangsung hampir 40 tahun di Libya, dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah yang masih berlangsung sampai sekarang (Sahide, Cipto, Muti’ah Setiawati, & Hadi, 2015).

Pada sebuah negara yang terjadi pemberontakan di dalamnya, melihat siapa yang memiliki atau tidak memiliki keinginan untuk melawan kelompok yang berkuasa, itu merupakan sebuah bukti untuk pengkajian. Begitupun di Suriah, pemberontakan dapat dikaji melalui seberapa besar kemauan oposisi rezim Al-Asad untuk turun tangan melawan rezim yang sedang berkuasa tersebut.

Arab spring yang melanda negara timur tengah telah memberikan dampak yang luar biasa bagi keadaan sosial maupun politik bagi Suriah. Kondisi saat pemerintah tidak lagi mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya karena ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah akibat terjadinya korupsi, kesewenangan dalam menegakkan peraturan, dan tingginya kesenjangan sosial, telah mendorong rakyat untuk berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan yang baru, ternyata tidak serta membuat Suriah kembali ke kondisi normal.

Gelombang arab *spring* yang dimulai pada Desember 2010 di negara Tunisia dan kemudian menjalar ke negara-negara timur tengah lainnya termasuk Suriah, merupakan hasil dari sebuah proses panjang atas kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Gelombang Arab Spring yang dengan cepat menyebar melalui dunia maya, menyadarkan negara-negara lain bahwa otoritarianisme sudah tidak lagi relevan dengan keadaan sosial dan politik saat ini. Gelombang demokrasi yang semakin keras disuarakan oleh aktivis-aktivis pro demokrasi dan dengan cepat menyebar melalui media internet (Kuncahyono, 2014).

Upaya penyebaran revolusi Arab Spring melalui internet sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis pembebasan Tunisia dan Mesir pada saat gelombang protes di kedua negara tersebut berlangsung. Mereka seolah ingin menyadarkan rakyat Suriah untuk bangun dan bergerak melawan rezim otoriter.

Pada awal Februari 2011, situs-situs sosial media seperti Facebook, Twitter di dalam maupun luar Suriah menyerukan dilakukannya demonstrasi besar-besaran di seluruh Suriah pada tanggal 4 dan 5 Februari 2011 untuk menuntut pemerintah segera melakukan reformasi. Para aktivis pro-demokrasi Tunisia dan Mesir mengirim sejumlah paket modem satelit, telepon seluler, computer, dan alat sosial media lainnya sebagai persiapan bila peristiwa besar seperti di Tunisia dan Mesir terjadi. Namun, menjelang hari tersebut para aktivis dihubungi dan diancam oleh intel dan pasukan keamanan untuk tidak melakukan demonstrasi tersebut (Kuncahyono, 2014).

Tanggal yang ditentukan oleh aktivis di luar Suriah, 4 dan 5 Februari 2011, mengingatkan mereka akan tragedi pemberontakan ikhwanul muslimin pada tahun 1982 di Hama. Tragedi tersebut membuat aktivis pro demokrasi di Suriah enggan melakukan demonstrasi karena yang mereka inginkan adalah perubahan secara damai, bukan perang saudara. Namun, saat terjadi penahanan terhadap limabelas anak-anak sekolah yang menulis *Ash-sha`b yurid isqat an-nizam* (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini) segalanya berubah. Demonstrasi untuk menuntut keadilan kepada gubernur kota Deraa, Faisal Kalthoum dijawab dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Situasi semakin keruh saat aparat keamanan menembaki para demonstran dengan senjata api (Kuncahyono, 2014).

Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa dari pihak demonstran. Sejak anak-anak tersebut ditahan oleh aparat keamanan, demonstrasi terus terjadi. Demonstrasi yang dilakukan kemudian tidak hanya menuntut pembebasan anak-anak tersebut, namun juga menuntut kebebasan politik. Para demonstran yang turun ke jalan tidak didengar aspirasinya dan dihadang kembali oleh petugas keamanan. Namun, mereka tetap melakukan hal tersebut karena pasca Damaskus Spring di awal tahun pemerintahan Bashar al-Asad, wadah aspirasi bagi rakyatnya tidak ada lagi (Rodrigues, 2011).

Setelah keinginan para demonstran semakin beragam, pemerintah pusat mulai turun tangan. Bashar al-Asad mengirim delegasinya yang berasal dari kota Deraa untuk menemui keluarga anak-anak yang ditahan tersebut. Jendral Rustom Ghazali, salah satu anggota Intelijen Militer Suriah, menjamin kepada para penduduk kota tersebut bahwa keadaan akan kembali seperti sedia kala dan anakanak yang ditahan oleh aparat keamanan akan segera dibebaskan. Aparat keamanan yang telah bertindak brutal pun akan diberikan sanksi.

Anak-anak yang dibebaskan ternyata mendapat penyiksaan dari petugas keamanan selama dalam tahanan dan hal tersebut membuat keluarga mereka marah dan memicu demonstrasi yang lebih besar. Rakyat yang akan berdemo memilih masjid sebagai tempat untuk berkumpul dan meyusun rencana, karena hanya masjid tempat yang tidak dicurigai sebagai tempat berkumpul.

Pasukan pengamanan pemerintah kota Deraa menyerang masjid yang biasa dijadikan tempat berkumpul sebelum demonstrasi, Masjid Omari yang berada tepat di jantung kota Deraa. Pasukan pengamanan tersebut menembaki orangorang yang ada di dalam masjid. Penyerangan tersebut membuat graffiti-grafiti anti rezim semakin banyak dan tulisan pada graffiti pun semakin beragam seperti Turunkan Rezim yang Korup.

Upacara penguburan orang-orang yang menjadi korban penembakan di dalam Masjid Omari dijadikan momentum untuk mengungkapkan kekecawaan serta perlawanan tehadap rezim. Dari situ demonstrasi lahir semakin membesar dan mulai merambat ke daerah lain termasuk dua kota terbesar di Suriah, Damaskus dan Aleppo (Kuncahyono, 2014).

Musim Semi itu kini telah mengorbankan lebih dari 250.000 orang di Suriah sampai saat ini karena konflik yang terus berkepanjangan. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), lebih dari 7,6 juta warga Suriah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri dan 4,2 juta mengungsi ke sejumlah negara di sekitar Suriah. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebutkan, 893.970 orang di antaranya mengalir ke Eropa (Sahide et al., 2015).

**Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dianggap lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap sebuah realitas di balik fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis konflik Arab spring di Suriah. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara penelusuran studi pustaka, dokumen berbentuk *press release* yang dikeluarkan oleh pemerintah, berita dan media online yang terkait dengan isu penelitian.

**Hasil dan Pembahasan**

**Faktor-Faktor Pemicu Konflik Suriah**

Rentetan masalah akibat dari berbagai kebijakan pemerintah Suriah, baik selama pemerintahan Hafiz al-Asad maupun Bashar al-Asad, telah melahirkan sebuah gelombang revolusi di negara tersebut. Berikut peneliti akan membahas masalah apa saja yang menjadi faktor pemicu konflik di Suriah. Sehingga, Suriah yang dianggap imun dari revolusi, justru menjadi negara yang paling lama mengalami pemberontakan karena konflik internal yang belum terselesaikan.

Terdapat tiga faktor utama pemicu konflik Suriah yaitu pertama, kebijakan militer Suriah. Pemerintah Suriah pada pemerintahan Bashar al-Asad, banyak yang hanya meneruskan kebijakan pada masa ayahnya, Hafiz al-Asad, terdahulu. Kebijakan tersebut ada juga yang telah mengalami perubahan, seperti kedudukan tentara Suriah di Lebanon pada masa pemerintahan presiden Hafiz al-Asad yang pada pemerintahan Bashar al-Asad telah berkembang menjadi penarikan pasukan militer Suriah dari negara tersebut akibat biaya operasi militer dan tuntutan rakyat Lebanon agar Suriah tidak perlu ikut campur akan masalah negara mereka (Ghadbian, 2001).

Tentara keamanan yang ditempatkan di luar wilayah suriah dan pasukan pengamanan untuk memata-matai segala aktivitas rakyat dibayar (40 dollar) sehari dan membuat negara harus menghabiskan sepertiga anggaran belanja negara untuk kebutuhan militer. Pemerintah Suriah jadi lebih memerhatikan kondisi militer ketimbang kesejahteraan rakyatnya. Anggaran belanja Suriah menghabiskan 50 persen untuk mendanai kebutuhan pasukan militer (Ghadbian, 2001).

Kedua adalah faktor kesenjangan ekonomi. Krisis ekonomi yang dirasakan rakyat Suriah sejak masa pemerintahan Hafiz al-Asad, terus berlanjut hingga anaknya, Bashar al-Asad, memimpin. Hal tersebut diperparah dengan kondisi rezim yang penuh dengan korupsi dan pegawai pemerintahan yang haus suap.

Pada masa pemerintahan Hafiz al-Asad, perekonomian Suriah tertinggal jauh dibawah negara-negara disekitarnya diiringi dengan berbagai permasalahan seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja, inefisiensi atau tidak tepat guna dalam menelola keuangan negara. Pendapatan perkapita Suriah sekitar 1.000 dollar, berbeda jauh dengan Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar, dan Israel dengan 17.000 dollar. Pengangguran diperkirakan berjumlah sekitar 22%, dan negara membelanjakan lebih dari 7% dari PNB dan hampir 50% dari anggaran adalah untuk pembiayaan militer dan pasukan keamanan. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber daya alam, jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya bantuan luar negeri, korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 3.15% (Ghadbian, 2001).

Ketika Bashar al-Asad berkuasa kondisi perekonomian Suriah pada saat itu memang tidak baik. PDB per kapita turun selama 1980an dan tidak menunjukan perubahan hingga pada tahun 1990an. Kemudian, Bashar al-Asad menjanjikan akan melakukan reformasi ekonomi. Pada tahun 2005, Bashar al-Asad memperkenalkan reformasi ekonomi dengan istilah ekonomi pasar sosial yang mengalihkan perekonomian yang dikelola oleh pemerintah menjadi perekonomian liberal. Liberalisasi ekonomi memberikan kemakmuran pada sejumlah kota besar seperti Damaskus dan Aleppo, namun tidak dapat merata dan menyebar ke daerah-daerah kecil atau kota-kota lain.

Sistem ekonomi Suriah didominasi oleh tiga kelompok. Pertama, para manager di sektor publik, pengusaha kecil, dan kelompok pelindung pengusaha 77 yang juga tergabung dalam kelompok keamanan dan militer. Kelompok-kelompok tersebut mendapat hak istimewa dalam perekonomian Suriah. Dan siapapun yang tergabung dalam pasukan militer atau pun pengamanan tidak akan tersentuh oleh hukum sehingga korupsi beredar di wilayah pasukan keamanan tersebut. Kesenjangan ekonomi semakin dirasa ketika tidak semua lapisan masyarakat dapat bergabung dengan pasukan keamanan tersebut, karena mazhab yang dianut juga berpengaruh dalam penerimaan untuk menjadi pasukan keamanan. Dari 200.000 tentara militer Suriah, sekitar 70% adalah Alawie.

Korupnya sistem di Suriah juga terlihat dari para pegawai negeri yang akan bekerja hanya jika disuap, termasuk memberikan kuasa untuk mengantarkan barang dan jasa yang memang sudah kewajibannya.

Pertumbuhan penduduk juga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Pada tahun 1975, angka kelahiran mencapai 50 kelahiran hidup per 1000 orang. (Kuncahyono, 2014) Angka kelahiran yang begitu tinggi adalah akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Suriah tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi dan berpendapat bahwa angka pertumbuhan yang tinggi dan migrasi internal akan menjadi stimulasi kemajuan sosial dan ekonomi dalam kerangka pembangunan.

Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun 1996 yaitu, 583.000 barrel. (Kuncahyono, 2014) Banyak industri-industri produktif yang sebelumnya mampu menyerap banyak tenaga kerja muda dibongkar dibawah pemerintahan Bashar al-Asad, sehingga pertumbuhan pengangguran pada usia kerja terus meningkat. Perekonomian diubah menjadi perekonomian rente yang dikontrol dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim yang berkuasa. Perubahan iklim yang ekstrem sepuluh tahun belakangan ini membuat Suriah dan negara Timur Tengah semakin kering. (Kuncahyono, 2014) Hal tersebut berpengaruh kepada sektor pertanian yang menghasilkan 20 persen GDP Suriah. Karena semakin buruknya kondisi perekonomian, perlahan muncul rasa ketidakpuasan di dalam masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, mulai dari kelompok ekonomi terpinggirkan.

Ketiga, isu Sunni-Alawie di Suriah. Setelah perang dunia pertama, aliansi kelompok yang menang dalam perang tersebut, Inggris dan Perancis, membagi provinsi Arab yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Ottoman menjadi beberapa bagian. Di bagian selatan tepatnya di Palestina, menjadi milik Inggris. Sedangkan di utara tepatnya di Suriah dan Lebanon menjadi milik Perancis. Suriah dibagi lagi menjadi enam bagian yaitu; Aleppo, Hama, Horns, Damaskus, Jabal al-Druze, dan Latakia. Begitupun dengan Lebanon yang juga dibagi menjadi 4 bagian yaitu; Tripoli, Beirut, Sidon, dan Tyre (Fildis, 2012).

Selama kependudukan Perancis di Suriah dari tahun 1920 hingga 1946, sekte atau aliran keagamaan bebas berkembang sehingga menimbulkan tekanan bagi nasionalisme Arab dan menahan laju gerakan kemerdekaan di negara tersebut. Separatisme, partikularisme keagaamaan, dan primordialisme memberikan usul untuk dilakukan otonomi daerah dimana kelompok minoritas menjadi mayoritas di wilayah tersebut.

Kelompok muslim Sunni yang mengembangkan paham Nasionalisme Arab merasa terancam atas kependudukan dan kebijakan Perancis maupun Kristen dan juga kelompok muslim yang dianggap menyimpang seperti Druze, Ismaili, dan Alawie. Tujuan politik dari kelompok Nasionalisme Arab (Pan Arab) ialah merdeka dan menyatukan seluruh negara-negara Arab di bawah satu naungan pemerintahan. Tujuan tersebut bertentangan dengan keinginan Perancis dan kelompok minoritas lain yang ada di Suriah. Karena, arogansi kelompok Sunni Arab akan membuat pemerintahan menjadi berkelas-kelas dan menomorduakan kelompok minoritas selain Sunni Arab sebagai kelompok Arab yang tidak sempurna.

Oleh karena itu, pemerintah Perancis di Suriah memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok Druze, Alawie, dan beberapa kelompok minoritas lainnya. Pemerintah Perancis mengabulkan dua daerah otonomi di Suriah untuk dua kelompok minoritas Druze dan Alawie.

Pada tahun 1922, wilayah Jabal al-Druze, yang berlokasi di wilayah Druze di selatan Damaskus, memproklamirkan diri berpisah di bawah perlindungan Perancis, dengan gubernurnya sendiri dan anggota kongres terpilih. Wilayah pegunungan di belakang Latakia, dengan populasi Alawie sebagai mayoritasnya, menjadi rezim administrasi khusus yang berada di bawah perlindungan Perancis secara langsung dan memproklamirkan diri sebagai negara terpisah.

Kebijakan *divide and rule* yang diterapkan pemerintah Perancis mencegah kelompok Nasionalis Arab menginfeksi daerah yang dihuni minoritas. Pemerintah pendudukan Perancis juga memutus tali antara oposisi nasionalis perkotaan dan 83 daerah pinggiran. Karena kebijakan ini pula, pergerakan nasionalis Suriah menemui kendala besar dalam memperluas aktivitasnya diluar Damaskus, Aleppo, Hama, dan Horms.

Pemerintah Perancis, sebagai negara yang menguasai Suriah pada saat itu, tidak pernah melatih administrasi yang efisien dan elit yang berdedikasi dan justru malah mempersulit hubungan antara Sunni Arab sebagai mayoritas dan kelompok-kelompok minoritas. Hal tersebut karena sesungguhnya Perancis tidak ingin melepas kendalinya atas Suriah.

Selanjutnya, Perancis berusaha mengikis tali antara etnis dan kaum religius Suriah, penempaan golongan satu dengan golongan lain sehingga masing-masing kelompok saling menyerang (Fildis, 2012). Pemerintah Perancis di Suriah menerapkan aturan perihal keberagaman etnis dengan penempatan terpisah etnis-etnis di kepala cabang lembaga pemerintahan yang berbeda, dengan mengizinkan satu etnis atau kelompok keagamaan untuk dominan mewakili etnisnya dalam suatu lembaga. Kebijakan tersebut membuat kelompok Sunni Arab sangat dominan di dalam politik, petugas kepolisian, namun tidak terwakili dalam militer. Sebaliknya, etnis Circassian (Kaukasus) mengisi pasukan militer, namun tidak terwakili di dalam parlemen dan kepolisian. Kaum Alawie pun menduduki pasukan militer, namun tak terwakili di politik dan petugas kepolisian.

Karakteristik kehidupan politik di Suriah ialah penuh kisruh persaingan antar elite politik itu sendiri, di dalam kota atau antara pemimpin di lain kota, atau antara pemimpin perkotaan dengan pedesaan. Kelompok Nasionalis Arab menghadapi sebuah pertentangan antara persatuan Pan-Arab dan kepentingan lokal.

Sebelum merdeka, gerakan nasionalis Suriah terwakili di Blok Nasional (*al-Kutla al-Wataniya*), sebuah persatuan veteran dari berbagai latar belakang dan tertarik untuk bersatu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Ketika kependudukan Perancis berakhir, kelompok Sunni yang tinggal di perkotaan mewarisi pemerintahan Suriah dari Perancis. Pasca kemerdekaan, pemerintahan Suriah berangsur-angsur menghapuskan wilayah minoritas serta wakilnya di parlemen, dimana mereka mendapat keuntungan semasa pemerintahan Perancis. Langkah tersebut ialah menghapuskan beberapa kebijakan hukum yang mengabulkan entitas kaum Alawie dan Druze pada masa kepemimpinan Perancis.

Penghapusan kebijakan yang berlandaskan hukum tersebut dalam rangka mendirikan pusat kekuasaan di Damaskus guna menyalakan pertentangan antar minoritas. Penguasa-penguasa Sunni di Damaskus menyatukan kota Latakia kedalam negara Suriah dan menghapuskan negara bagi kaum Alawie. Kursi untuk kaum Alawie di Parlemen dan pengadilan tinggi yang menggunakan hukum Alawie juga dihapuskan. Saat itu, kaum Alawie sebagai minoritas tanpa dukungan Perancis berdamai atas kebijakan tersebut guna mendapatkan kewarganegaraan Suriah.

**Analisis Kelompok Alawie**

Alawie merupakan kelompok minoritas miskin dan terpinggirkan di Suriah. Bahkan sejak negara tersebut dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Kaum Alawie lebih dikenal dengan sebutan Nusayris atau Ansaris. Nama tersebut diubah oleh Perancis, saat negara tersebut menduduki Suriah. Pendudukan Perancis memposisikan negara Alawie, Latakia, pada 1 Juli 1922. Kaum Alawie juga memperoleh otonomi yang legal.

Kaum Alawie merupakan golongan petani miskin di Suriah, yang bekerja untuk kelompok tuan tanah Sunni dan Kristen di pegunungan di daerah Latakia. Efek politik atas kemiskinan diperburuk dengan kondisi geografis yang jauh dari perkotaan. Kelompok Sunni yang hidup di daerah perkotaan sangat menikmati kekayaan dan menguasai buruh tani dan petani Alawie. Semasa pendudukan Perancis di Suriah, negara tersebut membentuk sebuah pasukan keamanan yang disebut Troupes Speciales du Levant, sebuah pasukan militer lokal yang terbentuk pada tahun 1921 dan kemudian dikembangkan menjadi pasukan keamanan Suriah-Lebanon. Pemerintah Perancis juga menggunakan prinsip divide and rule pada saat seleksi penerimaan pasukan Troupes Speciales du Levant. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kelompok-kelompok etnis dari mendapatkan posisi kekuasaan penuh sehingga membahayakan kedudukan Perancis di Suriah.

Dalam usahanya, pasukan militer mengembangkan sebuah pedesaan yang kuat dari keterwakilan minoritas, dengan detasemen khusus yang terdiri atas kaum Alawie, Druze, Kurdi, dan Circassian (Kaukasus). Perancis menganggap pasukan dari minoritas pedesaan yang jauh dari wilayah perkotaan karena warga urban yang mayoritas Sunni Arab telah didominasi ideologi Nasionalis Arab, sehingga lebih menjadi kendala baru bagi Perancis jika tetap ingin mengambil hati kaum urban Suriah.

Kebijakan Perancis atas penerimaan pasukan militer mengakibatkan perlemahan pada pasukan nasionalisme Arab Sunni yang dahulu digunakan untuk menantang pendudukan negara tersebut. Sehingga, representasi Arab Sunni pada pasukan militer lebih rendah dari jumlah populasinya di Suriah.

Pasukan Troupes Speciales du Levant digunakan untuk memelihara perintah dan menekan pemberontakan lokal. Pasukan tersebut secara luas terdiri dari kaum-kaum minoritas, yang aktivitasnya mengarah pada kebencian dengan Sunni (Fildis, 2012). Kondisi tekanan ekonomi membuat pasukan keamanan sebagai kendaraan gerakan sosial kaum Alawie.

Menjelang akhir kependudukan Perancis, beberapa infantri dan battalion tersusun hampir sepenuhnya diisi oleh kaum Alawie. Tidak satu pun battalion yang tersusun sepenuhnya berisi Sunni Arab. Namun ada beberapa battalion yang diisi sejumlah Sunni Arab yang biasanya berasal dari wilayah pedesaan dan wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan perkotaan. Kelompok Sunni Arab yang kaya seperti tuan tanah, yang memimpin pergerakan nasionalis Arab selama kependudukan Perancis, secara tidak langsung menguatkan kecenderungan terhadap representasi kuat atas minoritas pada pasukan Troupes Speciales du Levant dengan menolak untuk mengirim putra-putra mereka untuk mendapatkan latihan militer, walau sebagai perwira, pada pasukan yang mana mereka lihat untuk melayani kepentingan pemerintah Perancis.

Walaupun kelompok Alawie merupakan kelompok yang hidup dibawa garis kemiskinan pada saat itu, dengan pendapatan perhari seorang buruh tani sebesar 22 piastres sedangkan standar biaya hidup mencapai 50 piastres, pemuda Alawie sangat memanfaatkan kesempatan mereka di dunia militer Suriah. Pendapatan kecil namun rutin yang mereka dapatkan sebagai pasukan keamanan membuat mereka disiplin, terlatih, dan membuka gagasan-gagasan baru bagi kemajuan pasukan tersebut. Bagi kaum Alawie saat itu, melayani pemerintah Perancis membuat permulaan peluang besar bagi perubahan nasib kaum Alawie.

Walaupun kelompok Alawie banyak mengisi pasukan militer, pangkat mereka hanyalah kopral, sersan, dan perwira muda sebelum akhirnya diambil alih oleh partai Ba’ath pada tahun 1963. Pada sisi lain, kelompok yang paling penting, yang menjalankan politik dan strateginya dan menjadi bagian penting dari infantry battalion adalah kelompok Sunni.

Pemimpin-pemimpin Sunni rupanya percaya bahwa melayani posisi atas untuk mereka sendiri akan mencukupi untuk mengambil alih militer. Pemimipin tiga kudeta pertama antara 1949 hingga 1954 semuanya dari 88 kelompok Sunni. Pada periode antara 1954 dan 1958, ketika negara Suriah dengan Mesir bersatu menjadi Persatuan Republik Arab (*United Arab Republic*) didirikan, para petugas kepolisian dibagi kedalam golongan yang saling berlawanan. Perjuangan antara perwira senior Sunni diperlemah oleh keterwakilan kelompok Sunni pada kesatuan militer dan memperkuat minoritas yang sebagaian besar berada pada kesatuan tersebut. Saat perwira Sunni saling mengeliminasi satu sama lain, kelompok Alawie mulai mewarisi posisi mereka dan mengalami kenaikan jabatan. Saat ada satu saja anggota Alawie yang menduduki jabatan penting dalam kesatuan tersebut, ia segera menarik kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan di sekelilignya. Dua institusi pemerintahan yang memainkan peran utama, militer dan partai Ba’ath, selanjutnya di kuasai oleh kelompok Alawie hingga mereka dapat menambah kekuasaan dan akhirnya mengambil alih kehidupan politik Suriah.

Keinginan untuk bersatunya negara-negara Arab mulai dijalankan oleh kelompok Nasionalis Arab yang memerintah Suriah setelah Perancis menarik mundur pasukannya dari Suriah pada April 1946. Selama bergabungnya Suriah dengan Mesir menjadi satu pemerintahan 1958-1961, seluruh partai politik yang dulunya berkembang di Suriah dilarang. Namun, larangan tersebut tidak dindahkan oleh beberapa orang yang termasuk ke dalam golongan Alawie. Dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia, mereka tetap menjalankan roda organisasi Ba’ath tersebut. Mereka percaya suatu hari 89 Suriah akan kembali melepaskan diri dari persatuannya dengan Mesir. Tahun 1961, Suriah menyatakan berpisah secara pemerintahan dengan Mesir (Fildis, 2012).

Dalam keadaan sebagai negara baru yang kosong pemerintahan partai Ba’ath, yang dulunya secara sembunyi-sembunyi berjalan, hadir sebagai satusatunya partai yang siap memimpin Suriah. Dominasi golongan militer dalam partai Ba‟ath memiliki akar pada saat Suriah dan Mesir bersatu. Pemimpin kelompok; Salah Jadid, Hafez al-Asad, Muhammad Umran, kesemuanya merupakan anggota Alawie, dan Hamad Ubayd merupakan kelompok Druze. Tujuan dari organisasi adalah memulihkan pasukan Suriah kedalam kekuasaan Suriah. Anggota organisasi rahasia ini belakangan diketahui sebagai anggota militer, yang tidak termasuk ke dalam struktur pengurus partai Ba‟ath, namun saat organisasi tersebut kosong, kepengurusan partai diambil alih oleh mereka.

Saat akhirnya kelompok Alawie dapat menguasai kehidupan politik di Suriah, mereka memanfaatkan dengan memberi posisi-posisi strategis dalam militer dan pemerintahan kepada sanak keluarga mereka. Orang-orang yang dekat walau bukan keluarga pun dapat menikmati kesempatan merasakan kemudahan berbisnis di negara tersebut.

Kekuasaan yang diperoleh kelompok Alawie sangat dimanfaatkan dengan baik. Dahulu saat Suriah masih dikuasai kerajaan Ottoman kemudian dikuasai oleh Perancis, kelompok Alawie terkenal sebagai rakyat kelas paria yang hanya akan berprofesi sebagai buruh tani atau pekerja kasar lainnya tanpa pendidikan yang memadai.

Pada tahun 1970, Hafez al-Asad menguasai Partai Ba’ath dan kemudian menjadi presiden. Saat ia berkuasa, Hafez al-Asad berusaha memperkuat posisinya melalui kekuasaan Partai Ba’ath yang sekular. Beberapa kelompok, terutama dari kalangan Sunni, menentang kebijakan sekular yang dijalankan Partai Ba’ath.

Tahun 1976 hingga 1982, kelompok Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) memimpin pemberontakan melawan rezim di kota Hama. Kemudian, pada Februari 1982 pemerintah Suriah membombardir kota tersebut hingga sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani untuk menentang rezim Hafez al-Asad.

Setelah 30 tahun menjabat sebagai presiden, karena faktor usia Hafez al Asad meninggal dunia pada 10 Juni 2000. Setelah meninggal, Bashar al-Asad, melanjutkan tampuk kepemimpinan yang diberikan ayahnya dengan cara mengubah konstitusi negara tersebut yang menetapkan usia minimum presiden pada usia 40 menjadi 34, sesuai dengan usia Bashar saat itu. Kemudian pada 10 Juli 2000, diadakan referendum nasional untuk pemilihan calon tunggal Bashar al-Asad sebagai Presiden Suriah. (Basyar, 2013)

Semasa pemerintahan Hafez al-Asad yang kemudian dilanjutkan oleh Bashar al-Asad, pendidikan untuk kelompok minoritas, terutama Alawie, pun membaik. Terbukti dengan universitas-universitas di Suriah kini diisi oleh dosen-dosen dari kelompok Alawie.

**Kesimpulan**

Fenomena Arab Spring yang terjadi di kawasan Arab merupakan sebuah pergerakan rakyat untuk melawan pemimpin atau pemerintah yang dianggap otoriter. Begitupun yang terjadi di Suriah tiga faktor pemicunya yaitu kebijakan militer Suriah, Kesenjangan ekonomi yang dirasakan rakyat dan isu konflik Sunni-Alawie. Kemudian pengaruh media sosial yang menyebarkan isu Arab spring sehingga gerakan demonstrasi remaja menjadi titik mula konflik suriah ini terjadi.

**Daftar Pustaka**

Basyar, M. H. (2013, January 21). *The Indonesian Society for Middle east studies (ISMES).* Retrieved from The Indonesian Society for Middle east studies (ISMES) Site: http://ismes.net/2013/01/krisis-suriah-dan-pengaruhnya-bagi-dunia-islam/

Fildis, A. T. (2012). Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria. *Middle East Policy*, *19*(2), 148–156. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00541.x

<http://sosiologis.com/herbert-spencer-ahli-waris-teori-darwin>

<http://www.dw.com/id/anggaran-belanja-senjata-dunia-terus-meningkat/a-3340680>

<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>

<https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-budget.htm>

Ghadbian, N. (2001). The new Asad: Dynamics of continuity and change in Syria. *Middle East Journal*.

Kuncahyono, T. (2014). *Musim Semi di Suriah : Anak-ank Sekolah Penyulut Revolusi.*

Rizki Roza, 2008. Dual-Use Teknologi Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional AS. Jurnal HubunganInternasional UMY, Volume IV No. 1. Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta, hlm. 15

Rodrigues, J. (2011, August 1). *1982 : Syria‟s President Hafez Al-Assad crushes rebellion in Hama.* Retrieved from The Guardian Web site: https://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2011/aug/01/hama-syria-massacre-1982-archive

Sahide, A., Cipto, B., Muti’ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, *4*(2), 118–129. https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129